
PEMBENTUKAN MASYARAKAT MAJEMUK MALAYSIA: MIGRASI KOLONIAL, SEGREGASI ETNIK, DAN WARISAN SOSIO-POLITIK

CONSTRUCTING MALAYSIA'S PLURAL SOCIETY: COLONIAL MIGRATION, ETHNIC SEGREGATION, AND SOCIO-POLITICAL LEGACIES

Linda Sunarti

Universitas Indonesia

Jln. Prof. Dr. Nugroho Notosusanto Kampus UI, Depok, Jawa Barat, Indonesia

sunartilinda70@gmail.com

Diterima tanggal 10 Agustus 2025

Disetujui tanggal 20 Desember 2025

ABSTRACT

This study examines the formation of Malaysia's plural society through the lens of migration and colonialism, spanning from the 15th century to the post-independence era. Employing qualitative historical analysis, it identifies critical phases of demographic transformation that altered the pre-colonial social structure. Departing from classical plural society theory, this study argues that Malaysia's ethnic segregation was not merely a natural by-product of market forces, but rather a product of colonial policies intentionally designed to create fragmentation. British colonialism fundamentally transformed the social fabric through the large-scale migration of Chinese and Indian labourers under exploitative systems such as the credit-ticket and kangany systems. This migration generated rigid inter-ethnic divisions of labour and spatial segregation, with Chinese labourers concentrated in tin mining and Indian labourers in rubber plantation. The study further highlights that the post-independence institutionalization of the "bumiputra" concept emerged as a post-colonial state construct that sought to deconstruct-yet simultaneously reproduce-colonial racial logics for the purpose of economic redistribution. The New Economic Policy (NEP, introduced after major ethnic riots and focused on the bumiputera, has not fully addressed these structural colonial legacies. This is evident in contemporary settlement patterns, which continue to reflect historical spatial fragmentation. The study concludes that Malaysia's contemporary socio-economic challenges are rooted in the failure to fully dismantle colonial identity structures. Meaningful multicultural reconciliation therefore requires policy reforms that go beyond diversity management toward a more inclusive national integration.

Keywords: colonial migration, ethnic segregation, Malaysian plural society, bumiputra policy, and multicultural reconciliation.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pembentukan masyarakat majemuk Malaysia melalui perspektif migrasi dan kolonialisme dari abad ke-15 hingga pascakemerdekaan. Dengan metode analisis historis kualitatif, studi ini mengkaji fase-fase kritis transformasi demografi yang mengubah struktur masyarakat prakolonial. Berbeda dengan teori masyarakat majemuk klasik, studi ini berargumen bahwa struktur segregasi di Malaysia bukan sekadar hasil alamiah dari ekonomi pasar, melainkan produk rekayasa kebijakan kolonial yang sengaja menciptakan fragmentasi. Kolonialisme Inggris mengubah struktur masyarakat secara mendasar melalui migrasi besar-besaran buruh Cina dan India melalui sistem yang eksploitatif, seperti sistem tiket kredit dan kangany. Migrasi ini menciptakan segregasi pekerjaan antaretnik yang kaku dan segregasi spasial permukiman. Buruh Cina terkonsentrasi di pertambangan timah, sedangkan buruh India di perkebunan karet. Studi ini menyoroti bahwa pelembagaan konsep bumiputera pascakemerdekaan merupakan konstruksi negara pascakolonial yang mencoba mendekonstruksi sekaligus mengadopsi logika rasial kolonial untuk redistribusi ekonomi. Kebijakan Ekonomi Baru (NEP) pascakerusuhan etnik besar, yang berfokus pada bumiputra, belum sepenuhnya berhasil mengatasi ketimpangan struktural warisan kolonial. Hal ini terbukti dari pola permukiman modern yang masih merefleksikan fragmentasi spasial historis ini. Studi menyimpulkan bahwa tantangan sosio-ekonomi Malaysia saat ini berakar pada kegagalan dekonstruksi identitas warisan kolonial. Rekonsiliasi multikultural yang substantif memerlukan reformasi kebijakan yang melampaui manajemen keberagaman menuju integrasi identitas nasional yang inklusif.

Kata kunci: migrasi kolonial, segregasi etnik, masyarakat majemuk Malaysia, kebijakan bumiputra, dan rekonsiliasi multikultural.

A. PENDAHULUAN

Malaysia, sebagai salah satu negara paling multietnik di Asia Tenggara, merupakan produk dari gelombang migrasi yang dipicu oleh kekuatan kolonial Eropa pada abad ke-18 hingga ke-20. Dinamika kemajemukan yang dianalisis dalam artikel ini, terutama mengacu pada pengalaman di Semenanjung Malaya. Sebagai sebuah negara federal yang juga mendapatkannya sebagai negara bangsa, dalam lanskap sosio-politik, Malaysia memberikan ruang bagi setiap kelompok etnik untuk terus menjalankan tradisi dan kebudayaan mereka (Tajudin dan Zawawi 2024). Komposisi demografisnya yang unik

dengan mayoritas etnik Melayu, Cina, India, dan kelompok pribumi Sabah-Sarawak, tidak hanya mencerminkan dinamika sejarah kolonial tetapi juga menjadi akar dari tantangan sosio-politik kontemporer, termasuk ketegangan etnik dan kebijakan afirmatif bumiputra. Meskipun banyak studi telah mengkaji sejarah migrasi kolonial Malaysia (Andaya 1982; Kaur 2004) atau kebijakan bumiputra pascakemerdekaan (Hirschman 1986), hubungan kausal antara kedua aspek ini masih belum dieksplorasi secara mendalam. Penelitian ini bertujuan mengisi celah akademis tersebut dengan menganalisis bagaimana kebijakan buruh kolonial Inggris membentuk

segregasi etnik yang kemudian menjadi dasar bagi ketidaksetaraan struktural dan konflik pascakemerdekaan, sekaligus meng-evaluasi implikasinya terhadap studi masyarakat multikultural di Asia Tenggara. Artikel ini juga bertujuan untuk mereformulasi teori *plural society* dengan menunjukkan bagaimana fragmentasi kolonial tidak berhenti pada era kolonial, namun bertransformasi menjadi perangkat kebijakan negara pascakolonial.

Studi-studi terdahulu tentang migrasi kolonial Malaysia cenderung berfokus pada deskripsi kronologis kedatangan kelompok etnik Cina, India, dan Indonesia, serta dampak ekonomi jangka pendek dari sistem buruh kontrak (Blythe 1953). Di sisi lain, literatur tentang kebijakan bumiputra, seperti Artikel 153 Konstitusi Malaysia, yang menjamin hak istimewa Melayu biasanya dianalisis melalui lensa politik pascakolonial (Shamsul 1986; Milner 2008). Namun, hanya sedikit penelitian yang menghubungkan segregasi spasial dan pekerjaan era kolonial dengan legitimasi kebijakan bumiputra modern. Misalnya, Furnivall (1948) dalam teori *plural society*-nya menyatakan bahwa masyarakat kolonial terfragmentasi secara etnik tanpa integrasi sosial, tetapi ia tidak menjelaskan bagaimana fragmentasi ini berevolusi menjadi kebijakan negara pascakolonial. Adapun, studi mutakhir, seperti karya Fathi (2024) tentang nasionalisme Melayu, hanya menyentuh sekilas peran warisan kolonial dalam membentuk identitas bumiputra.

Ketiadaan analisis holistik ini menciptakan celah pemahaman tentang akar struktural ketidakadilan etnik di

Malaysia. Sebagai contoh, kebijakan New Economic Policy (NEP) 1971 yang bertujuan mengurangi kesenjangan ekonomi antara Melayu dan non-Melayu sering dikritik sebagai diskriminasi sistematis (Gomez dan Saravanamuttu 2018). Namun, hanya sedikit yang menelusuri kebijakan ini hingga ke praktik kolonial Inggris yang memisahkan etnik berdasarkan sektor pekerjaan: Melayu di sektor tradisional, Cina di pertambangan, dan India di perkebunan (Hassan 1992). Padahal, segregasi ini tidak hanya melanggengkan ketimpangan ekonomi, tetapi juga polarisasi identitas kolektif, yang kemudian dimanfaatkan dalam narasi politik pascakemerdekaan (Hirschman 1986).

Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak jangka panjang migrasi kolonial terhadap formasi masyarakat majemuk Malaysia dan implikasinya pada konflik etnik pascakemerdekaan. *Pertama*, kajian akan menelusuri bagaimana kebijakan buruh Inggris abad ke-19, seperti sistem kangany untuk buruh India dan tiket kredit untuk buruh Cina, menciptakan hierarki etnik yang terinstitusionalisasi. *Kedua*, penelitian akan mengaitkan warisan hierarki ini dengan kebijakan Bumiputra pascakolonial, termasuk ketegangan selama pembuatan Konstitusi Malaysia 1957 dan kerusuhan etnik 13 Mei 1969. Melalui pendekatan sejarah-sosiologis, penelitian ini menjawab pertanyaan: bagaimana segregasi etnik era kolonial menjadi dasar bagi kebijakan afirmatif dan konflik identitas di Malaysia modern?

Temuan penelitian ini memberikan

tiga kontribusi utama. *Pertama*, secara empiris, studi ini memperkaya pemahaman tentang hubungan antara kolonialisme, migrasi, dan konstruksi identitas nasional di Asia Tenggara, sebuah wilayah dengan keragaman etnik yang tinggi namun rentan konflik (Anderson 1983). *Kedua*, secara teoretis, penelitian ini menguji relevansi teori masyarakat majemuk (*plural society*) Furnivall dalam konteks pascakolonial, sekaligus memperkenalkan perspektif baru tentang bagaimana kebijakan kolonial dapat membentuk rezim identitas negara modern. *Ketiga*, secara praktis, analisis ini memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan untuk merancang program rekonsiliasi multikultural yang mengakui akar sejarah ketidaksetaraan, sebagaimana dibutuhkan dalam konteks Malaysia yang masih bergulat dengan isu rasial (Gomez 2020).

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode sejarah untuk menelusuri dan menjelaskan bagaimana kebijakan migrasi kolonial menciptakan kondisi struktural bagi pembentukan masyarakat majemuk Malaysia. Rentang temporal studi mencakup lima abad (abad ke-15 hingga era kontemporer), dengan fokus kritis pada periode kolonial Inggris (1874-1957) dan transisi pascakemerdekaan (1957-1971). Hal ini untuk mempermudah analisis transformasi masyarakat majemuk dari akar historis hingga manifestasi modern.

Sumber data dikumpulkan melalui triangulasi multidimensi untuk memastikan kedalaman dan kredibilitasnya. Data primer meliputi arsip kolonial Inggris, seperti British Malaya Colonial Reports (laporan administratif tahunan 1874-1956), catatan sensus resmi (1911-1947) yang mendokumentasikan segregasi pekerjaan dan spasial/lokasi, serta dokumen kebijakan migrasi seperti Tamil Immigration Fund (1907) yang merekam mekanisme rekrutmen buruh India. Untuk perspektif prakolonial, *Sejarah Melayu* (Shellabear 1991) menjadi sumber autentik, yang dilengkapi dengan untuk memoar migran Cina dan India merekonstruksi pengalaman kelompok terpinggirkan. Dokumen pascakolonial seperti Konstitusi Malaysia 1957 (Pasal 153), Rukun Negara (1970), dan laporan resmi New Economic Policy (NEP 1971), dianalisis untuk melacak kontinuitas warisan kolonial. Sumber sekunder mencakup teori klasik *plural society* dari Furnivall (1948), model migrasi Mc Gee (1965), studi mutakhir tentang kebijakan bumiputra (Gomez 2020), serta konflik etnik (Hirschman 1986) yang berfungsi sebagai kerangka interpretatif.

Analisis data dilakukan dalam dua tahap sistematis. *Pertama*, analisis konten yang mendekonstruksi dokumen arsip dan sensus untuk mengidentifikasi pola kebijakan eksploitatif, seperti sistem tiket kredit untuk buruh Cina dan kangany untuk buruh India, beserta dampaknya pada segregasi spasial (permukiman etnik) dan pekerjaan (konsentrasi Cina di pertambangan, sedangkan India di perkebunan). *Kedua*, interpretasi kritis

yang menghubungkan temuan ini dengan ketimpangan pascakolonial menggunakan lensa teoretis. Misal, menguji relevansi teori Furnivall dalam konteks kerusuhan 1969 dan kegagalan NEP mengurangi kesenjangan kepemilikan saham (bumiputra 2,4% versus Cina 75% pada 1970).

Validasi data dijaga melalui triangulasi: catatan sensus kolonial divalidasi dengan *Sejarah Melayu* (Shellabear 1991) dan dokumen pascakemerdekaan. Adapun bias perspektif kolonial diimbangi dengan memoar milik para imigran dan literatur kritis seperti analisis Hirschman (1986) tentang konstruksi rasial. Batasan penelitian diakui secara jelas, termasuk keterbatasan akses arsip primer (misal, catatan internal perkebunan Swettenham&Co.), bias bahasa pada dokumen Tamil/Mandarin yang belum diterjemahkan penuh, serta sensitivitas politik kerusuhan 1969. Untuk mitigasi, fokus temporal dipersempit ke periode 1874-1971. Pendekatan metodologis ini tidak hanya merekonstruksi apa yang terjadi, tetapi juga mengungkap bagaimana segregasi kolonial mereproduksi ketidaksetaraan, dan mengapa fragmentasi spasial bertahan dalam lanskap sosio-ekonomi Malaysia modern.

C. HASIL DAN BAHASAN

1. Transformasi Demografi Malaysia: Dari Masyarakat “*Relatively Low-density Pluralism*” ke Masyarakat Majemuk

Sebelum abad ke-18, struktur masyarakat Malaysia (dikenal sebagai Tanah Melayu) didominasi oleh kelompok etnik pribumi, seperti Orang

Asli, Melayu, dan bumiputra Sabah-Sarawak. Orang Asli, yang terdiri dari subkelompok Semang, Jakun, dan Negrito, hidup secara nomaden di pedalaman dengan mengandalkan kehidupan berburu dan meramu hasil hutan. Sementara itu, masyarakat Melayu menetap di wilayah pesisir dan muara sungai, bekerja sebagai petani padi, nelayan, atau terlibat dalam perdagangan rempah di bawah Kesultanan Malaka. Stratifikasi sosial Melayu bersifat hierarkis: Sultan dan bangsawan berada di puncak, diikuti oleh rakyat biasa yang bekerja sebagai petani subsisten, serta hamba yang terikat pada sistem feodal. Migrasi dari luar masih terbatas, seperti kedatangan orang Minangkabau dari Sumatra yang berasimilasi dengan budaya Melayu. Di Sabah dan Sarawak, komunitas Kadazan-Dusun, Iban, dan Melanau hidup dalam struktur kesukuan yang dipimpin ketua adat.

Memasuki akhir abad ke-18, kolonialisme Inggris mengubah wajah demografi Malaysia secara radikal. Motivasi ekonomi, khususnya eksploitasi bijih timah dan perkebunan karet, mendorong Inggris mendatangkan buruh dari Cina, India, dan Indonesia melalui sistem rekrutmen yang eksploitatif. Buruh Cina, yang melarikan diri dari kemiskinan dan kerusuhan di Tiongkok (seperti Pemberontakan Taiping 1857), direkrut dengan sistem tiket kredit. Mereka terikat hutang kepada tauke (majikan) dan ditempatkan di tambang timah. Pada 1901, 65% penduduk Selangor adalah etnik Cina, menggeser dominasi Melayu. Berbeda dengan buruh Cina, buruh India dari Tamil Nadu dan Kerala

direkrut melalui sistem kangany untuk bekerja di perkebunan karet. Pada 1909, sekitar 55.132 buruh India bekerja di sektor ini, dengan tingkat kematian tinggi akibat kondisi kerja yang buruk. Selain itu, ada pula para pekerja yang datang dari Jawa dan Sulawesi yang kemudian bekerja di perkebunan Sabah-Sarawak, serta pekerja Sinhala dari Sri Lanka yang bekerja di sektor kereta api.

Pemerintah kolonial Inggris secara sistematis mengotak-ngotakkan kelompok etnik ke dalam sektor ekonomi spesifik melalui kebijakan terstruktur. Etnik Cina mendominasi sektor pertambangan khususnya komunitas Hakka dan Kantonis, sedangkan buruh India dikonsentrasikan di perkebunan karet. Etnik Melayu dipetakan ke sektor pertanian tradisional lewat Malay Reservations Act 1913, sebuah undang-undang yang bertujuan mencegah orang bukan Melayu, terutama imigran India dan Cina, membeli tanah-tanah yang dimiliki orang Melayu. Kebijakan tersebut secara paradoks melindungi hak tanah, namun menimbulkan perdebatan tentang kesamarataan hak antarkaum di Malaysia, sekaligus secara tidak langsung mengucilkan orang Melayu dari ekonomi modern.

Segregasi multidimensi ini melahirkan “masyarakat majemuk” (Furnivall 1948), yakni masyarakat yang terdiri atas berbagai kelompok dengan perbedaan agama, suku, ras, budaya, dan bahasa yang hidup berdampingan, tetapi tetap mempertahankan identitas masing-masing dengan interaksi antaretnik yang minimal. Pola pemisahan direproduksi

secara konsisten, berupa permukiman yang terfragmentasi berdasarkan etnik, lapangan kerja yang terkotak-kotak, dan sistem pendidikan yang terpisah. Di masa pascakolonial, demografi negeri-negeri Melayu, seperti Selangor, Perak, dan Pahang, mencerminkan warisan kebijakan ini. Populasi etnik Cina tumbuh menjadi kelompok terbesar, menyusul Melayu dengan jumlah signifikan, dan komunitas India yang juga berkembang pesat.

McGee (1965), dalam tulisannya yang berjudul *A Population: A Preliminary Analysis*, menjelaskan lima tahap kedatangan penduduk ke Semenanjung, Sabah, dan Sarawak sejak ribuan tahun yang lalu hingga tahun 1940-an. Lima fase migrasi yang dikemukakan oleh McGee (1965:69-72) dapat digunakan sebagai kerangka utama untuk memahami transformasi demografi Malaysia. Setiap fase tidak hanya mencerminkan pola migrasi yang berbeda, tetapi juga mengubah komposisi etnik secara signifikan yang membentuk masyarakat majemuk yang menjadi ciri khas Malaysia modern. Berikut deskripsi kronologis proses migrasi ke wilayah Malaysia yang kemudian membentuk masyarakat Malaysia saat ini.

a. Fase 1: Migrasi Austronesia (Sebelum Masehi hingga Abad ke-7 M)

Migrasi pertama yang membentuk dasar demografi Malaysia adalah perpindahan orang Melayu Austronesia dari daratan Asia Tenggara (diduga dari Yunnan atau Taiwan) ke Semenanjung Melayu dan Borneo, sekitar 4.000 tahun yang lalu. Kelompok ini, yang

merupakan bagian dari rumpun bahasa Austronesia, secara bertahap mendesak komunitas pribumi terdahulu (Orang Asli) ke pedalaman melalui superioritas teknologi pertanian dan organisasi sosial. Pola migrasi ini tercermin dalam bukti arkeologi, misalnya temuan tembikar *cord-marked* (tembikar berhias tali) di Gua Niah, Sarawak, dan situs prasejarah di Perak (Bellwood 1997:134).

Pada abad ke-5 M, populasi Melayu Austronesia diperkirakan mencapai 60-70% penduduk Semenanjung Melayu, sementara Orang Asli tersisa 30-40% (Bellwood 1997:211). Distribusi geografisnya menunjukkan segregasi ekologis yang jelas, sebagai berikut.

- 1) Orang Asli (termasuk subkelompok Semang, Senoi, dan Jakun) bertahan di hutan tropis pedalaman dengan pola hidup nomaden, berburu, dan meramu hasil hutan.
- 2) Melayu Austronesia menguasai wilayah pesisir dan muara sungai, serta mengembangkan pertanian lahan basah (padi sawah) dan perdagangan maritim awal (Andaya dan Andaya 2001:47).

Migrasi Melayu Austronesia ke Semenanjung Melayu membawa transformasi sosio-budaya yang mendalam. *Pertama*, mereka memperkenalkan teknologi pertanian revolusioner, termasuk sistem penanaman padi sawah dan manajemen irigasi terstruktur, yang memungkinkan surplus pangan dan pembentukan permukiman permanen di pesisir (Oppenheimer 1998:89). Teknologi ini menjadi fondasi ekonomi agraris Malaysia hingga kini. *Kedua*, migrasi ini menggantikan sistem sosial

egalitarian Orang Asli dengan struktur hierarkis berbasis *chiefdom*. Kepemimpinan didasarkan pada kekerabatan dan keturunan sehingga menciptakan stratifikasi sosial yang kontras dengan kesetaraan komunitas pribumi pedalaman (Fix 2000:117). *Ketiga*, tercipta jaringan perdagangan maritim awal yang menghubungkan Semenanjung Melayu dengan peradaban global. Salah satu buktinya, pada abad ke-2 M, Pelabuhan Langkasuka menjadi hub dagang rempah dan timah dengan India dan Tiongkok yang menanamkan akar kosmopolitanisme dalam budaya Melayu (Wheatley 1961:52).

Warisan migrasi ini juga tercermin dalam identitas genetik dan bahasa linguistik Malaysia modern. Penelitian DNA mitokondria menemukan Haplogroup E1a1a sebuah penanda genetik yang menunjukkan hubungan kekerabatan antara suku Melayu Austronesia dengan populasi di Filipina dan Taiwan. Temuan ini membuktikan adanya migrasi kuno dari arah utara (Taiwan dan Filipina) ke Nusantara (Hill et al. 2006:467).

Bahasa Melayu Kuno berkembang menjadi *lingua franca* atau bahasa penghubung dalam perdagangan dan diplomasi, sementara bahasa suku asli, seperti Temiar dan Jahai, tetap terisolasi di pedalaman. Kondisi ini mencerminkan pembagian geografis akibat migrasi bangsa Austronesia di masa lalu (Benjamin 2001:33). Dua warisan ini, yaitu kesinambungan genetik dan dominasi linguistik, menjadi pilar penting dalam pembentukan identitas Melayu Malaysia modern.

b. Fase 2: Kerajaan Melayu-Hindu, Islamisasi, dan Pembentukan Masyarakat Multietnik (Abad ke-7 hingga ke-16 M)

Fase kedua transformasi demografi Malaysia dimulai dengan masuknya pengaruh kebudayaan India melalui kerajaan-kerajaan Melayu-Hindu, seperti Gangga Negara (Perak) dan Langkasuka (Kedah), pada abad ke-7 M. Pedagang India membawa agama Hindu-Buddha sekaligus mengintegrasikan konsep kenegaraan seperti *devaraja* (raja ilahi) ke dalam struktur politik Melayu. Prasasti Sanskerta di Bukit Meriam (Kedah) dan candi-candi di Lembah Bujang menjadi bukti akulturasi ini (Miksic 2013:89).

Pada abad ke-14, gelombang Islamisasi di Nusantara mulai menguat seiring dengan kedatangan para pedagang Muslim dari Gujarat (India) dan Timur Tengah. Mereka tidak hanya membawa komoditas dagang, tetapi juga menyebarkan ajaran Islam melalui interaksi perdagangan dan perkawinan dengan penduduk lokal. Proses Islamisasi ini mencapai puncaknya dengan berdirinya Kesultanan Malaka (1400-1511), kerajaan Islam pertama di Semenanjung Melayu yang menjadi pusat penyebaran agama dan perdagangan di Asia Tenggara.

Di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Shah (Parameswara yang memeluk Islam) dan para penerusnya, Malaka berkembang menjadi *entrepot* (pelabuhan transit) global yang menghubungkan pedagang dari Tiongkok, India, Arab, dan seluruh Nusantara. Pada puncak kejayaannya, Kesultanan Malaka menampilkan komposisi penduduk yang unik dan

kompleks. Berdasarkan kajian Shellabear (1991), sekitar 80% populasi Malaka saat itu merupakan etnik Melayu-Muslim yang mendominasi struktur kekuasaan.

Interaksi intensif antarkelompok etnik melahirkan fenomena perkawinan campur yang signifikan. Catatan Portugis pascapenaklukan tahun 1511 mengungkapkan bahwa sekitar 10% penduduk Malaka merupakan keturunan campuran Cina-Melayu, cikal bakal komunitas Baba-Nyonya yang kelak menjadi ciri khas masyarakat Malaka. Angka ini menunjukkan tingkat integrasi sosial yang tinggi antara pendatang dan pribumi, sekaligus menjadi bukti awal terbentuknya masyarakat multietnik di Malaysia.

Struktur masyarakat Malaka abad ke-15 dapat dipetakan secara hierarkis melalui empat kelompok utama. *Pertama*, elite Melayu-Muslim yang menguasai politik dan perdagangan regional. *Kedua*, komunitas Cina (8%) yang terspesialisasi dalam kerajinan tembikar, perdagangan sutera, dan industri logam di kawasan Bukit Cina (Sandhu 1961:112). *Ketiga*, pedagang India-Arab (7%) yang menjadi penghubung vital dengan jaringan perdagangan Timur Tengah. *Keempat*, kelompok peranakan (5%) yang berperan sebagai mediator budaya berkat penguasaan multilingual dan jaringan kekerabatan lintas etnik (Wade 1997).

Kompleksitas sosial ini tercatat dalam *Sejarah Melayu* (Shellabear 1991) dan dokumen Portugis “*Alguns Documentos do Arquivo Nacional*” (Alves 1892:33), yang sama-sama

mengonfirmasi karakter kosmopolitan Malaka. Kehidupan sosial di Kesultanan Malaka abad ke-15 menampilkan pola unik yang memadukan integrasi dengan segregasi. Di pusat kota yang ramai, berbagai kelompok etnik hidup berdampingan namun tetap mempertahankan batas-batas komunitas mereka. Orang Melayu mendominasi kawasan pusat pemerintahan dan istana, komunitas Cina terkonsentrasi di Bukit Cina, dan orang India di Kampung Keling (Sandhu 1961). Pembagian wilayah ini mencerminkan sistem sosial yang terstruktur sekaligus menunjukkan toleransi kesultanan terhadap keberagaman.

Namun, kehidupan multietnik ini tidak sepenuhnya harmonis. Dominasi pedagang Arab dalam perdagangan rempah sering memicu ketegangan dengan komunitas Jawa yang merasa termarginalkan (Meilink-Roelofs 1962). Persaingan ekonomi ini menunjukkan bahwa di balik keragaman yang tampak damai, terdapat dinamika kekuasaan yang kompleks. Kesultanan harus terus menyeimbangkan kepentingan berbagai kelompok untuk menjaga stabilitas kerajaan.

Warisan paling abadi dari interaksi multietnik ini terlihat dalam perkembangan budaya. Bahasa Melayu berkembang menjadi *lingua franca* yang kaya akan kosakata Sanskerta dan Arab (Collins 1998). Sistem hukum kerajaan berhasil memadukan syariat Islam dengan adat Melayu dalam Hukum Kanun Melaka (Fang 1976). Bahkan dalam arsitektur, terlihat perpaduan unik seperti pada Masjid

Kampung Laut yang memadukan unsur Hindu, Cina, dan Islam (Nasir 1984). Percampuran budaya inilah yang menjadi fondasi identitas masyarakat Malaysia modern, sebuah sintesis harmonis dari berbagai pengaruh namun tetap berakar pada tradisi Melayu-Islam.

c. Fase 3: Migrasi Massal di Bawah Kolonial Inggris (Abad ke-18 hingga 1940-an)

Periode ketiga migrasi ke Tanah Melayu menjadi babak paling menentukan dalam pembentukan masyarakat Malaysia modern. Di bawah pemerintahan kolonial Inggris yang berorientasi ekonomi eksploitatif, migrasi massal sengaja dijadikan alat untuk mengeksploitasi kekayaan alam Semenanjung Malaya dan Borneo. Pesatnya perkembangan industri pertambangan timah dan perkebunan karet pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 menciptakan kebutuhan besar akan tenaga kerja murah. Untuk memenuhi kebutuhan ini, pemerintah kolonial secara sistematis mendatangkan sekitar 1,2 juta buruh dari China antara tahun 1850-1900 dan 800.000 buruh dari India pada periode 1870-1930 melalui sistem rekrutmen yang bersifat opresif dan tidak manusiawi (Kaur 2004:73).

Gelombang migrasi besar-besaran ini secara dramatis mengubah komposisi etnik di wilayah jajahan Inggris. Di Negeri-Negeri Melayu Bersekutu (Perak, Selangor, Negeri Sembilan, dan Pahang), populasi etnik Cina melonjak drastis dari 164.000 jiwa pada 1891 menjadi 693.000 jiwa pada 1911 (Blythe 1953:58). Perubahan

demografis ini menyebabkan tergesernya dominasi etnik Melayu di beberapa wilayah, khususnya di Selangor dan Perak yang menjadi pusat pertambangan timah. Selain buruh Cina dan India, kolonial Inggris juga mendatangkan sekitar 200.000 pekerja dari Jawa dan Bugis pada 1920-an. Mereka terutama ditempatkan di perkebunan tembakau Sabah dan perkebunan karet Sarawak sehingga memperkuat basis ekonomi kolonial di Borneo, sekaligus menambah keragaman etnik di wilayah tersebut (Reid 2015:112).

Data sensus kolonial menunjukkan perubahan dramatis dalam komposisi penduduk Malaya selama setengah abad pemerintahan Inggris. Pada 1891, populasi Malaya yang berjumlah 460.000 jiwa masih didominasi etnik Melayu (53%), namun pada 1947 telah berubah drastis menjadi masyarakat multietnik berjumlah 6,55 juta jiwa dengan dominasi baru etnik Cina (40%) dan peningkatan signifikan populasi India (20%). Lonjakan populasi ini terutama disebabkan oleh kebijakan kolonial yang secara masif mendatangkan tenaga kerja asing berjumlah sekitar 2,5 juta buruh Cina dan 1,2 juta buruh India untuk menopang industri pertambangan timah dan perkebunan karet (Kaur 2004:81).

Pembagian seperti ini sengaja dibuat oleh Inggris untuk memudahkan pengawasan dan mengontrol perekonomian. Akibatnya, terjadi pemisahan yang jelas antara kelompok etnik, baik dalam pekerjaan maupun tempat tinggal. Kebijakan ini meninggalkan dampak yang masih

terasa dalam masyarakat Malaysia hingga sekarang.

Thn	Melayu	Cina	India	Lainnya	Total
1891	246.000	164.000	38.000	12.000	460.000
1911	512.000	693.000	267.000	28.000	1.500.000
1947	2.427.000	2.614.000	1.304.000	210.000	6.555.000

Tabel 1. Perubahan penduduk Malaya (1891-1947). Sumber: Kaur 2004:81.

Pola pembagian kerja berdasarkan etnik ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara alami, melainkan hasil rekayasa pemerintah kolonial Inggris yang ingin mengontrol perekonomian dengan lebih mudah. Perubahan demografis ini diikuti dengan pembentukan struktur ekonomi yang terfragmentasi secara etnik. Pemerintah kolonial dengan sengaja mengembangkan sistem segregasi pekerjaan, 72% buruh Cina dipekerja-kan di pertambangan timah, 68% buruh India di perkebunan karet, sedangkan 85% masyarakat Melayu tetap bertahan di sektor pertanian tradisional. Kebijakan “*divide and rule*” ini menciptakan spesialisasi etnik dalam lapangan pekerjaan yang berbeda, sekaligus memperdalam jurang pemisah antarkelompok.

Pola pembagian kerja kolonial ini meninggalkan warisan struktural yang bertahan hingga masa kemerdekaan. Terbentuknya kantong-kantong ekonomi berdasarkan etnik tidak hanya memengaruhi distribusi kekayaan, tetapi juga membentuk persepsi tentang “pekerjaan etnik” tertentu yang masih terasa pengaruhnya dalam masyarakat Malaysia kontemporer. Sistem ini pada dasarnya dirancang untuk memudahkan kontrol

politik dan ekonomi kolonial, namun justru menciptakan ketimpangan struktural yang menjadi tantangan bagi pembangunan nasional pasca-kemerdekaan.

Di bawah pemerintahan kolonial Inggris, migrasi massal tidak hanya mengubah jumlah penduduk Malaya, tetapi juga menciptakan sistem kontrol ketat berdasarkan etnik. Inggris menerapkan tiga kebijakan rekrutmen yang berbeda untuk masing-masing kelompok, dengan dampak yang sangat berat bagi buruh migran maupun penduduk lokal.

Pertama, credit-ticket system untuk buruh Cina yang memaksa mereka menandatangani kontrak kerja dengan biaya pelayaran yang harus dibayar melalui potongan gaji. Akibatnya, buruh Cina terjatuh utang dan dipaksa bekerja di tambang timah dalam kondisi berbahaya. Di Perak, tingkat kematian buruh Cina mencapai 25% per tahun karena terjadinya longsor dan penyakit pernapasan (Blythe 1953:102). *Kedua, kangany system* untuk buruh India yang melibatkan mandor Tamil (*kangany*) yang merekrut pekerja dari India Selatan dengan janji palsu. Buruh India tersebut kemudian terjebak dalam kontrak kerja paksa di perkebunan karet. Di Selangor, 15% buruh India meninggal akibat malaria dan kekurangan gizi (Sandhu 1969). *Ketiga, Malay Reservations Act 1913* yang seolah melindungi tanah orang Melayu dengan melarang penjualannya kepada non-Melayu. Namun, kebijakan ini justru mengisolasi mereka dari ekonomi modern karena petani Melayu tetap miskin, sementara sektor

pertambangan dan perkebunan dikuasai buruh migran (Harper 1999:63).

d. Fase 4: Transisi Pascakolonial (1947-1957)

Setelah pendudukan Jepang (1942-1945), Malaysia berada dalam kondisi ekonomi dan politik yang rapuh. Ketika Inggris kembali berkuasa pada 1945, mereka menghadapi tantangan besar memulihkan stabilitas. Menanggapi situasi ini dan juga bangkitnya pemberontakan Partai Komunis Malaya (PKM) pada 1948, pemerintah Inggris menerapkan kebijakan pembatasan imigrasi yang sangat ketat yang dimulai di tahun yang sama. Kebijakan ini memiliki tujuan ganda, yakni menstabilkan perekonomian yang goyah dan menekan pengaruh serta pergerakan PKM.

Kebijakan pembatasan imigrasi yang ketat ini langsung membuahkan hasil yang signifikan. Hasil tersebut adalah terjadinya penurunan drastis dalam migrasi netto, yaitu selisih antara jumlah orang yang masuk dan keluar dari negara, terutama migran yang berasal dari Tiongkok Daratan. Data menunjukkan bahwa antara tahun 1947 hingga 1957, migrasi netto dari Tiongkok mengalami penurunan yang sangat tajam, mencapai sekitar 75% (Kaur 2004:129).

Kenaikan angka kelahiran juga terjadi dan disebabkan oleh dua faktor utama. *Pertama*, sejak dekade 1930-an telah terjadi peningkatan migrasi perempuan dari Tiongkok dan India. Arus migrasi perempuan ini berhasil menyeimbangkan komposisi gender dalam komunitas imigran. Sebagai contoh, pada 1947, rasio gender etnik

Tiongkok telah mencapai 100 pria untuk setiap 120 wanita (1:1,2) (Sandhu 1969:155). Keseimbangan gender yang lebih baik ini memungkinkan lebih banyaknya pembentukan keluarga, yang pada akhirnya mendorong kelahiran generasi baru secara lokal. *Kedua*, pemerintah Inggris memperkenalkan berbagai program kesehatan masyarakat, dengan vaksinasi massal sebagai salah satu andalannya. Program-program kesehatan publik ini berhasil menurunkan angka kematian bayi secara signifikan. Dampak positif dari perbaikan kesehatan ini sangat nyata terlihat, khususnya pada komunitas India, ditandai tingkat kelahiran yang dilaporkan meningkat hingga sekitar 40% pada 1950 (Hirschman 1986:371). Kombinasi dari keseimbangan gender yang memungkinkan pembentukan keluarga dan perbaikan kesehatan yang mengurangi kematian bayi inilah yang menjadi motor pertumbuhan alami penduduk non-Melayu meskipun imigrasi baru sangat dibatasi.

Berdasarkan data sensus 1957, terjadi perubahan signifikan dalam struktur etnik penduduk di Semenanjung Malaya. Orang Melayu berhasil memulihkan posisi mayoritasnya hingga jumlahnya mencapai 49,8% dari total populasi. Peningkatan ini terutama didorong oleh tingkat kelahiran (fertilitas) yang tinggi di wilayah pedesaan. Sementara itu, etnik Cina yang merupakan kelompok terbesar kedua (37,2%), terkonsentrasi di pusat-pusat perkotaan seperti Kuala Lumpur. Di sisi lain, populasi etnik India mengalami penurunan menjadi 11,3%, sebagian besar disebabkan oleh

program repatriasi (pemulangan) buruh perkebunan ke negara asalnya (Department of Statistics Malaysia 1960:45).

Konfigurasi etnik yang terlihat di Semenanjung Malaya ini sangat berbeda dengan dinamika yang terjadi di wilayah Borneo, yaitu Sabah dan Sarawak. Di Sabah, misalnya, imigran dari Jawa dan Banjar (sekitar 25%) mendominasi sektor pertanian karet berskala kecil. Etnik Cina (sekitar 15%), banyak yang menguasai perdagangan di wilayah pesisir. Kelompok bumiputra asli, seperti Kadazan-Dusun (sekitar 33%) dan Iban di Sarawak (sekitar 28%), tetap memegang status mayoritas. Hal yang mencolok, meskipun terdapat pembagian peran ekonomi, tidak terjadi segregasi sosial-ekonomi yang ekstrem seperti di Semenanjung Malaya. Masyarakat di Borneo relatif lebih terintegrasi dalam keragaman mereka (Leng 1965:92; Reid 2015:178; Ongkili 1985:67).

Menyikapi kembalinya dominasi demografi Melayu di Semenanjung Malaya dan untuk membangun kesatuan nasional menjelang kemerdekaan pada 1957, pemerintah menerapkan dua strategi penting. Strategi pertama adalah kebijakan *jus soli* (kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran) yang dimasukkan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan 1957. Kebijakan ini memberikan status kewarganegaraan kepada sekitar 1,2 juta warga non-Melayu yang lahir di Tanah Melayu. Pemberian kewarganegaraan luas ini berfungsi sebagai kompensasi politik atas pengakuan konstitusional terhadap

hak-hak istimewa Melayu (Stockwell 1999:112).

Strategi kedua difokuskan pada penguatan peran ekonomi orang Melayu. Hasilnya, terjadi peningkatan signifikan migrasi internal orang Melayu dari desa ke kota, yang jumlahnya mencapai sekitar 20% dalam periode 1950-1957. Gelombang migrasi ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dan dominasi ekonomi, yang sebelumnya banyak dipegang oleh etnik Cina di pusat-pusat perkotaan (Roff 1967:189). Kedua strategi ini, kewarganegaraan inklusif dan peningkatan partisipasi ekonomi Melayu urban, menjadi pilar penting dalam upaya menciptakan keseimbangan sosial-ekonomi yang lebih merata di ambang kemerdekaan Malaysia.

Hasil rekayasa demografis dan politik menjelang kemerdekaan melahirkan Kontrak Sosial 1957 yang bersifat paradoksal. Konstitusi Malaysia, terutama Pasal 153, secara resmi mengakui hak istimewa Melayu dalam bidang pendidikan dan ekonomi (Shamsul 1986:144). Namun, pengakuan hukum ini tidak serta-merta menghapus kesenjangan ekonomi. Data menunjukkan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita etnik Cina masih 2,7 kali lipat lebih tinggi dibanding Melayu (Jomo 2004:88). Kontradiksi ini menjadi fondasi ketegangan sosial-politik Malaysia modern.

Analisis kritis mengungkap kompleksitas motif di balik kebijakan kolonial Inggris. Pembatasan migrasi etnik Cina setelah 1948 tidak hanya ditujukan untuk menekan pengaruh

komunis, tetapi juga merupakan strategi memulihkan hegemoni demografi Melayu. Di sisi lain, kebijakan *jus soli* (kewarganegaraan berdasarkan kelahiran) bagi 1,2 juta non-Melayu dalam UU Kewarganegaraan 1957 dapat dipahami sebagai “imbalan politik” agar komunitas non-Melayu menerima posisi istimewa Melayu (Andaya dan Andaya 2001:257).

Di saat Semenanjung Malaya bergulat dengan segregasi warisan kolonial, pengalaman Borneo (Sabah/Sarawak) menawarkan narasi alternatif. Wilayah ini membuktikan pluralisme dapat berjalan tanpa segregasi ekstrem, terutama karena penolakan terhadap sistem perkebunan massal yang memicu polarisasi etnik (Reid 2015:180). Keberhasilan Borneo dalam menjaga keragaman justru memperlihatkan bahwa model integrasi di Semenanjung Malaya kurang berhasil diwujudkan.

Warisan fase transisi ini adalah paradoks Malaysia modern: negara secara hukum mengakui keragaman (multikulturalisme *de jure*) melalui Konstitusi 1957, namun praktiknya mempertahankan hegemoni bumiputra (*de facto*) lewat kebijakan afirmatif yang kerap diskriminatif. Kebijakan New Economic Policy (NEP) 1971, misalnya, meski bertujuan untuk menciptakan pemerataan, justru mengkristalkan ketimpangan berbasis etnik dan mengorbankan prinsip kesetaraan (Gomez 2020:33). Paradoks inilah yang terus membayangi upaya membangun identitas nasional inklusif.

2. Pascakemerdekaan Malaysia dalam Kerangka McGee: Transformasi Kebijakan dan Pola Migrasi (1957 hingga Akhir Abad ke-20)

Setelah kemerdekaan Federasi Malaya dari Inggris pada 1957 (bergabungnya Sabah, Sarawak, dan Singapura membentuk Malaysia pada 1963), dimulailah Fase 5 McGee, yaitu pascakemerdekaan dan migrasi kontemporer. Periode ini ditandai oleh intervensi aktif negara merdeka dalam merekonfigurasi kebijakan demografi dan ekonomi untuk membangun stabilitas nasional serta mengoreksi ketimpangan warisan kolonial (McGee 1991:17). Berbeda dengan fase kolonial yang bergantung pada impor tenaga kerja massal, pemerintah pascakemerdekaan memprioritaskan konsolidasi sosio-politik dan redistribusi sumber daya ekonomi (Kaur 2014:93).

Ketegangan etnik akibat disparitas ekonomi yang mengakar, terutama dominasi Tionghoa di sektor swasta dan marginalisasi Melayu di pedesaan, memuncak dalam Kerusuhan 13 Mei 1969. Peristiwa ini menjadi katalis redefinisi radikal kebijakan negara (Kessler 1972:58). Respons pemerintah terwujud dalam New Economic Policy (NEP) 1971. Kebijakan afirmatif berjangka 20 tahun ini memiliki dua tujuan inti, yakni mengentaskan kemiskinan tanpa memandang etnik dan merekayasa struktur ekonomi untuk meningkatkan kepemilikan aset serta partisipasi bumiputra (Jomo 2004:45).

Dalam kerangka McGee, NEP dapat dipahami sebagai *policy-driven migration regime*, yakni rezim mobilitas yang digerakkan secara sadar

oleh instrumen kebijakan negara. Secara normatif, NEP dirancang sebagai proyek integrasi nasional, tetapi secara struktural, kebijakan ini menghasilkan *resegmentasi* baru berbasis negara. Preferensi bumiputra dalam rekrutmen birokrasi, kuota pendidikan, dan lisensi bisnis (Gomez dan Jomo 1999:72) menciptakan redistribusi peluang ekonomi yang mendorong mobilitas spasial masyarakat Melayu dari pedesaan ke pusat-pusat perkotaan. Urbanisasi Melayu pada dekade sekitar 1970-1990 tidak semata hasil industrialisasi, tetapi juga konsekuensi langsung dari desain kebijakan yang membuka akses sektor publik sebagai domain prioritas bumiputra (Embong 1996).

Proses ini mempercepat perubahan komposisi demografi kota-kota utama, seperti Kuala Lumpur dan George Town (McGee 1991:21). Migrasi internal yang terinduksi kebijakan menggeser struktur etnik perkotaan yang sebelumnya didominasi nonbumiputra, sekaligus menciptakan koridor pertumbuhan baru seperti Lembah Klang (Hirschman 1986:357). Akan tetapi, alih-alih menghapus diferensiasi etnik dalam ekonomi, NEP membentuk segmentasi struktural baru: bumiputra yang terkonsentrasi di sektor publik dan korporasi terkait negara, serta etnik Cina yang tetap dominan di sektor swasta dan bisnis (Sloane 1999:84). Dalam perspektif ini, integrasi berjalan melalui mekanisme *resegmentasi* yang dilembagakan.

Pertumbuhan ekonomi pasca-NEP, khususnya sejak 1980-an, memperlihatkan dimensi lain dari rezim migrasi pascakemerdekaan. Ekspansi

sektor perkebunan, konstruksi, dan jasa menciptakan permintaan tenaga kerja menengah-rendah yang tidak sepenuhnya terpenuhi oleh angkatan kerja lokal. Situasi ini mendorong arus masuk pekerja migran asing dari Indonesia, Bangladesh, dan Filipina (Hugo 1993:180). Migrasi internasional tersebut menjadi subsistem yang terintegrasi dalam ekonomi Malaysia, dengan negara secara aktif mengatur kuota dan sektor penyerapannya demi menjaga momentum industrialisasi (Kaur 2014:97). Dengan demikian, jika pada masa kolonial migrasi dikendalikan oleh kapital imperium, pada fase pascakemerdekaan mobilitas tenaga kerja menjadi instrumen fleksibel dalam strategi pembangunan nasional.

Melalui lensa McGee (1991:23-25), konfigurasi ini menghasilkan kondisi yang disebut sebagai *managed pluralism*. Komposisi multietnik Malaysia tidak dihapus, tetapi dipertahankan melalui pengelolaan diferensial distribusi sumber daya dan kesempatan ekonomi (Goh 2008:112). Negara bertindak sebagai arsitek utama yang menyeimbangkan stabilitas politik dengan melakukan rekayasa mobilitas internal dan internasional.

Namun demikian, pola di Semenanjung Malaysia tidak sepenuhnya identik dengan dinamika di Sabah dan Sarawak. Struktur etnik di kedua wilayah Borneo ini berbeda, dengan populasi pribumi non-Melayu, seperti Iban, Kadazan-Dusun, dan Dayak yang signifikan. Integrasi Sabah dan Sarawak ke dalam federasi pada 1963 tidak sepenuhnya mengikuti pola *resegmentasi* birokratik seperti di

Semenanjung Malaysia. Di wilayah ini, migrasi lintas batas dari Filipina Selatan dan Indonesia Timur memainkan peran penting dalam membentuk demografi lokal, sering kali dipengaruhi faktor keamanan dan ekonomi regional (Hugo 1993:180). Dengan demikian, jika di Semenanjung Malaysia NEP berfungsi sebagai instrumen utama rekayasa mobilitas internal bumiputra melalui ekspansi sektor publik (Gomez dan Jomo 1999:72), maka di Sabah dan Sarawak konfigurasi migrasi lebih ditentukan oleh dinamika perbatasan dan pluralitas pribumi yang tidak sepenuhnya terintegrasi dalam kerangka dominasi Melayu. Divergensi ini menunjukkan bahwa rezim migrasi Malaysia pascakemerdekaan bersifat berlapis: terpusat dan terencana di Semenanjung Malaysia, tetapi lebih kompleks dan perifer di wilayah Borneo. Secara keseluruhan, fase pascakemerdekaan Malaysia menegaskan tesis McGee bahwa negara modern Asia Tenggara merupakan produsen aktif struktur mobilitas penduduk.

3. Analisis Dampak Jangka Panjang: Ketidaksetaraan Ekonomi, Kebijakan Bumiputra, dan Kerusuhan Etnik

Konsep masyarakat plural yang dikemukakan oleh Furnivall (1944:304) menemukan manifestasi paling jelasnya di Malaya/Malaysia pada masa kolonial Inggris melalui tiga bentuk segregasi utama. Secara spasial, komunitas etnik dipisahkan ke dalam permukiman yang berbeda. Kampung Baru untuk Melayu, China Town untuk komunitas Cina, dan *estate lines* bagi buruh India, yang secara efektif mencegah terjadinya

integrasi sosial lintas etnik (Roff 1967:47). Pemisahan fisik ini diperkuat oleh diferensiasi ekonomi. Buruh Cina di sektor pertambangan memperoleh upah tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan buruh Melayu yang bekerja pada bidang serupa sehingga menciptakan kesenjangan pendapatan yang signifikan (Hirschman 1986:355). Di bidang pendidikan, sistem sekolah vernakular yang terpisah berdasarkan bahasa Melayu, Mandarin, dan Tamil, tidak hanya memelihara bahasa ibu masing-masing kelompok, tetapi juga memperkuat identitas etnik yang eksklusif dan terpisah (Roff 1967:112).

Pola segregasi ini tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari strategi *divide et impera* (*divide and rule*) pemerintah kolonial Inggris yang secara sadar merancang dan mempertahankan hierarki ekonomi sekaligus rasial di wilayah koloninya. Kebijakan tersebut bukan hanya membentuk struktur sosial yang timpang pada masa kolonial, tetapi juga meninggalkan warisan politik identitas yang mendalam. Dikotomi antara bumiputra dan nonbumiputra yang terbentuk di era kolonial ini kemudian dilembagakan kembali dalam bentuk kebijakan afirmatif pascakolonial, terutama melalui kebijakan ekonomi dan pendidikan yang dirancang untuk mengoreksi ketimpangan, namun pada saat yang sama mereproduksi batas-batas etnik dalam masyarakat Malaysia kontemporer (Gomez 2020:28).

Kerusuhan etnik 13 Mei 1969 menjadi titik balik dramatis dalam sejarah politik dan ekonomi Malaysia. Peristiwa ini tidak hanya mencerminkan

ketegangan etnik yang telah lama terakumulasi, tetapi juga menandai dimulainya era kebijakan sosial-ekonomi yang baru. Kerusuhan pecah setelah kemenangan signifikan partai oposisi yang didominasi etnik Cina dalam pemilu, yang oleh sebagian masyarakat Melayu dianggap mengancam hak istimewa mereka. Dalam dua hari berlangsungnya kekerasan tersebut, tercatat 196 korban jiwa mayoritas dari etnik Cina serta ratusan bangunan yang dijarah (Hirschman 1986:74).

Penelitian arsip sejarah mengungkap dua penyebab utama kerusuhan ini. *Pertama*, politik identitas, yang ditunjukkan dengan penggunaan narasi ketuanan Melayu oleh United Malays National Organisation (UMNO) sebagai instrumen mobilisasi massa, sedangkan Democratic Action Party (DAP) mendorong agenda kesetaraan hak politik (Milner 2008:141). *Kedua*, warisan segregasi kolonial, yang tampak melalui pemisahan permukiman dan sistem pendidikan yang memperkuat prasangka sosial antaretnik.

Warisan kolonial Inggris telah membentuk struktur ekonomi yang timpang, jauh sebelum kemerdekaan. Pada 1970, distribusi kepemilikan modal swasta menunjukkan disparitas ekstrem: etnik Cina menguasai sekitar 75% modal sektor swasta, sedangkan bumiputra hanya memiliki 2,4% (Gomez 2020:52). Ketimpangan ini diperparah oleh segregasi spasial yang berlanjut hingga dekade-dekade berikutnya. Data tahun 2020 menunjukkan 78% penduduk Cina tinggal di

pusat-pusat kota seperti Kuala Lumpur dan Penang, sedangkan 60% etnik Melayu terkonsentrasi di pedesaan (Jabatan Perangkaan Malaysia 2020:17). Selain itu, sistem pendidikan vernakular pun tetap memisahkan anak-anak berdasarkan etnik sehingga integrasi sosial menjadi minim.

Sebagai respons terhadap ketegangan pascakerusuhan, pemerintah memperkenalkan New Economic Policy (NEP) pada 1971. Kebijakan afirmatif ini bertujuan mengurangi ketimpangan ekonomi antaretnik dengan meningkatkan partisipasi bumiputra dalam sektor modern. Program NEP mencakup kuota pendidikan, kuota pekerjaan, dan target kepemilikan saham perusahaan swasta hingga 30% untuk bumiputra (Gomez 2020:45). Namun, meskipun kebijakan ini berhasil menumbuhkan kelas menengah Melayu, pelaksanaannya tidak luput dari kritik. Sebagian kalangan menilai NEP menghambat fleksibilitas pasar dan investasi asing serta mendorong emigrasi etnik Cina ke Singapura (Gomez dan Saravanamuttu 2018:88). Selain itu, manfaat NEP cenderung terkonsentrasi di tangan elite politik, sedangkan pada 1990 sekitar 40% rumah tangga Melayu masih hidup di bawah garis kemiskinan (Jomo 2004:215).

Indikator	Bumiputra	Tionghoa	India
Pendapatan Bulanan	RM 200	RM 450	RM 300
Kepemilikan Saham	2,4%	75%	1,2%
Tingkat Kemiskinan	65%	15%	35%
Distribusi Permukiman	60% pedesaan	78% perkotaan	Tidak tersedia
Partisipasi di Sektor Modern (1970)	Rendah	Tinggi	Sedang

Tabel 2. Perbandingan kondisi ekonomi etnik di Malaysia (1970). Sumber: Laporan NEP 1971:12; Jabatan Perangkaan Malaysia 2020:17.

Data ekonomi 1970 mengilustrasikan betapa tajamnya ketimpangan tersebut (lihat Tabel 2). Pendapatan bulanan bumiputra rata-rata RM 200, jauh di bawah Cina yang mencapai RM 450. Kepemilikan saham di sektor swasta juga timpang: bumiputra 2,4%, Cina 75%, dan India 1,2%. Tingkat kemiskinan menunjukkan kontras serupa, dengan 65% rumah tangga bumiputra berada di bawah garis kemiskinan, dibandingkan 15% Cina dan 35% India.

Kebijakan NEP, meski dimaksudkan untuk memperkuat kohesi nasional, justru mempertebal persepsi identitas eksklusif. Di kalangan Cina, muncul anggapan bahwa mereka adalah “pendatang” yang tidak sepenuhnya diterima, sementara sebagian Melayu merasa bahwa posisi mereka terus terancam oleh dominasi ekonomi nonbumiputra (Shamsul 1986). Ketegangan ini mendorong gelombang migrasi kelas menengah, terutama profesional Cina dan India ke Singapura dan Australia, yang pada gilirannya mengurangi keberagaman talenta di Malaysia (Gomez 2020:61). Dalam jangka panjang, ketimpangan struktural

yang diwariskan kolonialisme, dipertajam oleh politik identitas, yang terus membentuk lanskap sosial-ekonomi Malaysia hingga kini.

Teori lima fase migrasi yang dikemukakan oleh McGee (1965:42-44) telah menjadi salah satu kerangka penting dalam memahami sejarah perubahan demografi di Malaysia. Teori ini memetakan perjalanan migrasi mulai dari kedatangan awal komunitas Austronesia, masuknya pedagang Asia, gelombang kolonisasi Eropa, migrasi massal era kolonial Inggris, hingga migrasi pascakemerdekaan. Kekuatan utama dari model McGee terletak pada dua hal. *Pertama*, kerangka kronologisnya yang jelas sehingga memudahkan penelusuran transformasi masyarakat majemuk Malaysia dari masa ke masa. *Kedua*, penekanan McGee terhadap peran kolonialisme Inggris abad ke-19 sebagai titik balik demografi menegaskan pentingnya kebijakan kolonial dalam membentuk struktur sosial-ekonomi modern (McGee 1965:51). Segregasi pekerjaan di era kolonial membentuk ketidaksetaraan struktural yang kemudian menjadi akar bagi kebijakan afirmatif bumiputra dan berbagai ketegangan etnik.

D. SIMPULAN

Pembentukan masyarakat majemuk Malaysia merupakan buah dari dinamika sejarah yang kompleks. Kondisi ini dipicu oleh gelombang migrasi kuno, kebijakan kolonial Inggris yang segregatif, dan pergulatan identitas pascakemerdekaan. Kolonialisme secara sistematis menciptakan hierarki etnik melalui instrumen

eksploitatif seperti sistem kangany bagi buruh India dan tiket kredit bagi buruh Cina. Sistem tersebut memaksa kelompok-kelompok etnik terkotak dalam sektor ekonomi spesifik: Cina di pertambangan, India di perkebunan, dan Melayu di sektor tradisional. Pola segregasi spasial dan pekerjaan ini tidak hanya melanggengkan ketimpangan ekonomi, tetapi juga membentuk identitas kolektif yang terfragmentasi.

Warisan kolonial tersebut diperparah oleh kebijakan pascakemerdekaan seperti New Economic Policy (NEP), yang meski bertujuan mengurangi kesenjangan, justru mengukuhkan polarisasi etnik melalui pendekatan afirmatif berbasis bumiputra. Ketidaksetaraan struktural ditandai oleh dominasi Cina di sektor swasta dan marginalisasi Melayu di pedesaan yang memuncak dalam tragedi kerusuhan etnik 1969. Kerusuhan tersebut dipicu oleh kesenjangan pendapatan yang lebar dan politisasi identitas etnik.

Dalam analisis penelitian yang menggunakan teori Furnival-McGee, lima fase migrasi telah dialami oleh masyarakat majemuk Malaysia. Berdasarkan teori ini diketahui bahwa migrasi bukan sekadar perpindahan penduduk, melainkan instrumen kekuasaan yang membentuk struktur sosial jangka panjang. Namun, temuan empiris di Malaysia juga menunjukkan keterbatasan McGee. Teori ini belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana negara pascakolonial tidak hanya mewarisi, tetapi juga mereproduksi logika kolonial dalam bentuk kebijakan nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa kemajemukan di Malaysia tidak berjalan secara alami, tetapi dikelola

oleh negara melalui kebijakan identitas yang secara paradoks menjaga stabilitas, sekaligus melanggengkan sekat-sekat kolonial.

Temuan ini mengimplikasikan perlunya rekonsiliasi substantif melalui rekonstruksi kebijakan yang inklusif. Pendidikan multikultural diharapkan mampu mengintegrasikan narasi sejarah migrasi dan kontribusi semua etnik. Di sisi lain, reformasi ekonomi idealnya beralih dari kuota etnik menuju sistem berbasis kebutuhan. Program interaksi antaretnik, seperti perumahan campuran (Ethnic Integration Policy ala Singapura), dapat memutus segregasi spasial kolonial.

Di sisi akademis, penelitian lanjutan diperlukan untuk mengeksplorasi peran perempuan dalam migrasi kolonial, dampak migran kontemporer, serta identitas hibrid generasi muda yang mengadopsi konsep Malaysian First. Studi komparatif dengan negara ASEAN, seperti Indonesia, juga penting dilakukan untuk menilai keberhasilan kebijakan multikultural. Sebagai “komunitas terbayang” (Anderson 1983), masa depan Malaysia bergantung pada kemampuan membangun narasi nasional yang mengutamakan persatuan dalam keragaman serta kemampuan meninggalkan warisan diskriminasi kolonial dan politik yang divisif.

DAFTAR SUMBER

- Alves, J. M. 1892. *Alguns Documentos do Arquivo Nacional*. Lisboa: Academia das Ciências de Lisboa.
- Anderson, Benedict. 1983. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso.
- Andaya, Barbara Watson dan Leonard Y Andaya. 1982. *A History of Malaysia*. (1st ed.). Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- _____. 2001. *A History of Malaysia*. (2nd ed.). Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Bellwood, Peter. 1997. *Prehistory of the Indo-Malaysian Archipelago*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Benjamin, Geoffrey. 2001. “Orang Asli Languages: From Heritage to Death.” Hlm. 27-44 dalam *Minority Cultures of Peninsula Malaysia: Survivals of Indigenous Heritage*, disunting oleh R. Rashid dan W. J. Karim. Penang: Academy of Social Sciences (AKASS).
- Blythe, Wilfred Lawson. 1953. “Historical Sketch of Chinese Labour in Malaya.” *Malayan Branch of the Royal Asiatic Society* 20(1):64-114.
- Collins, James T. 1998. *Malay, World Language: A Short History*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Department of Statistics Malaysia. 1960. *Laporan Demografi Malaysia 1957*.
- Embong, Abdul Rahman. 1996. “Social Transformation, the State, and the Middle Classes in Post-

- Independence Malaysia.” *Southeast Asian Studies*, 34(3):524-47.
- Fang, Liaw Yock. 1976. *Undang-Undang Melaka*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Fathi, Syed Ahmad. 2024. “Nasionalisme: Dari Kebangsaan Melayu kepada Kebangsaan Malaysia.” Karya Ilmiah Pemenang Pertama pada Pertandingan Penulisan Ilmiah Kelab Sejarah, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang.
- Fix, Alan G. 2002. “Genes, Language, and Ethnic Groups: Reconstructing Orang Asli Prehistory.” *Bulletin of the Indo-Pacific Prehistory Association* 19(3):11-6.
- Furnivall, J. S. 1944. *Netherlands India: A Study of Plural Economy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- _____. 1948. *Colonial Policy and Practice: A Comparative Study of Burma and Netherlands India*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Goh, Daniel P. S. 2008. “From Colonial Pluralism to Postcolonial Multiculturalism: Race, State Formation, and the Question of Cultural Diversity in Malaysia and Singapore.” *Sociology Compass* (2)1: 232-53.
- Gomez, Edmund Terence. 2020. *Malaysia’s New Economic Policy: Growth and Redistribution*. Singapore: ISEAS.
- Gomez, Edmund Terence dan Johan Saravanamuttu, eds. 2018. *The New Economic Policy and Ethnic Relations in Malaysia*. Singapore: ISEAS.
- Gomez, Edmund Terence dan K. S. Jomo. 1999. *Malaysia’s Political Economy: Politics, Patronage and Profits*. Cambridge & Melbourne: Cambridge University Press.
- Hassan, Mohd. Amin. 1992. *Asas Perkembangan Ekonomi Tanah Melayu, Bijih Timah dan Getah Malaysia: Warisan dan Perkembangan*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Harper, Timothy Norman. 1999. *The End of Empire and the Making of Malaya*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hill, Catherine, Pedro Soares, Maru Mormina, Vincent Macaulay, William Meehan, James Blackburn, Douglas Clakke, Josehp Maripa Raja, Patimah Ismail, David Bulbeck, Stephen Oppenheimer, dan Martin Richards. 2006. “Physlogeography and Ethnogenesis of Aboriginal Southeast Asians.” *Molecular Biology and Evolution* 23(12): 2480-91.
- Hirschman, Charles. 1986. “The Making of Race in Colonial Malaya: Political Economy and Racial Ideology.” *Sociological Forum* 1(2):330-61.
- Hugo, Graeme. 1993. “Indonesian Labour Migration to Malaysia: Trends and Policy Implica-

- tions." *Southeast Asian Journal of Social Science* 21(1):36-70.
- Jabatan Perangkaan Malaysia. 2020. *Laporan Demografi Malaysia*.
- Jomo, K. S. 2004. *The New Economic Policy and Interethnic Relations in Malaysia*. Geneva, Switzerland: United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD).
- Kaur, Amarjit. 2004. *Wage Labour in Southeast Asia: Globalisation, the International Division of Labour and Labour Transformations*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- _____. 2014. "Labour Crossings in Southeast Asia: Linking Historical and Contemporary Labour Migration." *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society* 87(1):83-104.
- Kessler, Clive. S. 1972. "Islam, Society, and Political Behaviour: Some Comparative Implications of the Malaysian Case." *The British Journal of Sociology* 23(1):33-50.
- Leng, Lee Yong. 1965. *North Borneo (Sabah): A Study in Settlement Geography*. Singapore: Eastern Universities Press.
- McGee, T. G. 1965. "Population: A Preliminary Analysis." Hlm. 67-81 dalam *Malaysia, A Survey*, disunting oleh Wang Gungwu. New York: Frederick A. Praeger.
- _____. 1991. "The Emergence of Desakota Regions in Asia: Expanding a Hypothesis." Hlm. 3-25 dalam *The Extended Metropolis: Settlement Transition in Asia*, disunting oleh N. S. Ginsburg, B. Koppel, dan T. G. McGee. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Meilink-Roelofs, M.A.P. 1962. *Asian Trade and European Influence: In the Indonesian Archipelago Between 1500 and About 1630*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Miksic, John N. 2013. *Singapore and the Silk Road of the Sea, 1300-1800*. Singapore: National University of Singapore Press.
- Milner, Anthony. 2008. *The Malays*. Oxford: Wiley-Blackwell.
- Nasir, Abdul Halim. 1984. *Mosques of Peninsular Malaysia*. Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn. Bhd.
- Ongkili, James P. 1985. *Nation-building in Malaysia 1946-1974*. Singapore: Oxford University Press.
- Oppenheimer, Stephen. 1998. *Eden in the East: The Drowned Continent of Southeast Asia*. London. Weidenfeld and Nicolson.
- Reid, Anthony. 2015. *A History of Southeast Asia: Critical Crossroads*. Chichester: Wiley-Blackwell.
- Roff, William R. 1967. *The Origins of Malay Nationalism*. New Haven & London: Yale University Press.

Sandhu, Kernial Singh. 1961. "The Coming of Indians to Malaya." *Journal of Indian History* 39(3):1-45.

_____. 1969. *Indians in Malaya: Some Aspects of Their Immigration and Settlement (1786-1957)*. Cambridge: Cambridge University Press.

Shamsul, A. B. 1986. *From British to Bumiputra Rule: Local Politics and Rural Development in Peninsular Malaysia*. Singapore: ISEAS.

Shellabear, W. G. 1991. *Sejarah Melayu*. Petaling Jaya: Fajar Bakti.

Sloane, Patricia. 1999. *Islam, Modernity, and Entrepreneurship among the Malays*. Basingstoke: Macmillan Press and New York: St. Martin's Press.

Tajudin, Abdul Aqmar Ahmad dan Hussain Yusri Zawawi. 2024. "Federalisme dan Negara Bangsa: Memikirkan Pembudayaan Budaya Politik Federal dalam Pembinaan Kenegaraan Malaysia." *Journal of Administrative Science* 21(1):65-94.

Wade, Geoff. 1997. "Melaka in Ming Dynasty Texts." *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society* 70(1(272)):31-69.

Wheatley, Paul. 1961. *The Golden Khersonese*. Kuala Lumpur: University of Malaya Press.